

PENGEMBANGAN MATERI PEMBELAJARAN PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN TINGKAT SEKOLAH MENENGAH ATAS DALAM PERSPEKTIF ISLAMISASI ILMU DAN PEMBINAAN AKHLAK MULIA

Endang Surahman¹, Adian Husaini², Endin Mujahidin², Didin Saefudin³

¹Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka Jakarta, Indonesia

²Universitas Ibn Khaldun Bogor, Indonesia

² Universitas Islam Negeri Jakarta

Abstract

Among the goals of Indonesian national education mentioned in Article 3 of Chapter 2 of the Indonesian Act No. 20 issued in 2003 is the development of students' potentials to be deeply believing, cautiously devout and morally well-behaved individuals. This goal is considered quite religious, encouraging efforts to build a believing, devout and well-behaved nation. However, this very religious national education goal has in practice not yet been much achieved, since there are still many instances of prevalent moral violation in society, such as mass fighting, crimes, coercion, etc, in addition to horizontal conflicts among different political groups, ethnics, religious groups and others. In such situation, a thorough study on both the concept and implementation of the national education related to how it can build students' good character is justified. This study takes a closer look at education in senior high schools as a case. This study seeks to: (1) point out some existing weaknesses of Citizenship Education subject matters taught in the first level of senior high schools, noticing the absence of Islamic values, (2) develop a model of revised subject matters of Citizenship Education for the first level of senior high schools through the perspectives of the Islamization of sciences and good character building. This study takes a more descriptive approach in which all relevant things are explored and described. With this approach, this study describes a situation going on when the research is conducted, and analyzes the causes of a certain phenomenon found. In addition, this study uses content analysis to find out the extent to which character building is contained in textbooks. This study finds that: (1) the subject matters of Citizenship Education are in general empty from religious values in striking contrast with the religious nature of national education aim; (2) there is an urgent need for developing Citizenship Education subject matters based on the perspective of the Islamization of sciences that might better build high school students' good character.

Keywords: Akhlak Mulia, Islamisasi Ilmu, Pendidikan Kewarganegaraan,

I. Pendahuluan

Tujuan pendidikan Nasional yang tertuang pada Bab II pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah untuk berkembangnya potensi agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Tujuan pendidikan Nasional yang menargetkan terbentuknya manusia beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, dikatakan Hamka Abdul Aziz; "... sebagai poin plus bagi Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional".¹ Hamka Abdul Aziz juga mengatakan; "Tujuan pendidikan Nasional yang ingin menjadikan peserta didik sebagai orang yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, adalah keputusan yang berani dari lembaga pembuat undang-undang".²

Ramayulis turut mengetengahkan pernyataan dalam bukunya "*Ilmu Pendidikan Islam*" tentang tujuan pendidikan Nasional, yaitu: "Butir-butir dalam tujuan pendidikan Nasional terutama yang menyangkut nilai-nilai dasar dan berbagai aspeknya, sepe-nuhnya nilai-nilai dasar ajaran Islam, tidak ada yang bertentangan dengan pen-didikan Islam."³

Substansi tujuan pendidikan Nasional, terutama dalam pembentukan akhlak mulia, sejalan dengan pemikiran Mohammad Athiyah Al-Abrosyi, yaitu:

Pendidikan dan pengajaran bukanlah memenuhi otak anak didik dengan segala macam ilmu yang belum diketahui, tetapi maksudnya ialah mendidik akhlak dan jiwa mereka, menanamkan rasa *fadhilah* (keutamaan), membiasakan mereka dengan kesopanan yang tinggi, mempersiapkan mereka untuk suatu kehidupan yang suci seluruhnya ikhlas dan jujur.⁴

Sejalan pula dengan pemikiran Muhammad Khalid Fathoni, bahwa pendidikan dalam ajaran Islam memiliki fungsi membangun *akhlâqul karîmah*.⁵ Akan tetapi, perlu usaha keras dan harus menempuh jalan panjang untuk membentuk kualifikasi manusia sesuai tujuan pendidikan Nasional. Sebab, sebagian penduduk di negeri ini sedang mengalami krisis akhlak atau krisis moral, yang ditandai maraknya pelanggaran norma-norma agama dan hukum, seperti korupsi, kolusi, pemaksaan kehendak, tindak kriminal, dan lain-lain. Sebagaimana dipaparkan dalam buku *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, sebagai berikut:

1. Nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya bangsa tidak dijadikan sumber etika dalam berbangsa dan bernegara oleh sebagian masyarakat. Hal itu kemudian melahirkan krisis akhlak dan moral yang berupa ketidakadilan, pelanggaran hukum, dan pelanggaran hak asasi manusia.
2. Konflik sosial budaya telah terjadi karena kemajemukan suku dan agama tidak dikelola dengan baik dan adil oleh pemerintah maupun masyarakat.
3. Penegakan hukum tidak berjalan dengan baik dan pelaksanaannya telah diselewengkan sedemikian rupa, sehingga bertentangan dengan prinsip keadilan, yaitu persamaan hak warga negara di hadapan hukum.

4. Perilaku ekonomi yang berlangsung dengan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta kurangnya keberpihakan kepada kelompok usaha kecil dan menengah, sehingga telah menyebabkan krisis ekonomi yang berkepanjangan, utang besar yang harus dipikul oleh negara, pengangguran dan kemiskinan yang semakin meningkat, serta kesenjangan sosial ekonomi yang semakin melebar.
5. Sistem politik tidak berjalan dengan baik, sehingga belum dapat melahirkan pemimpin-pemimpin yang amanah, mampu memberikan teladan dan memperjuangkan kepentingan masyarakat.⁶

Menurut Zaenal Abidin Ahmad, jika di suatu negeri terjadi krisis akhlak maka akan menimbulkan bencana besar, sehingga dalam sebentar waktu akan mengancam keruntuhan umat seluruhnya, dan menjadi suatu krisis yang bersifat *multi complex*, krisis di dalam segala lapangan.⁷

Fakta terjadinya krisis akhlak pada sebagian bangsa Indonesia itu, mengundang pertanyaan tentang peran mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan sebagai pengusung nilai-nilai moral. Dimana peran mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang berisi tentang konsep kehidupan berbangsa dan bernegara? Bukankah mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan memiliki peran strategis dalam mewujudkan tujuan pendidikan Nasional? Dan bukankah mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan memiliki tujuan yang sangat ideal, yaitu:

Membentuk warga negara yang baik, yakni warga negara yang memahami dan mampu melaksanakan dengan baik hak-hak dan kewajibannya sebagai individu dan memiliki kepekaan dan tanggung jawab sosial, mampu memecahkan masalah-masalahnya sendiri dan juga masalah-masalah kemasyarakatan secara cerdas sesuai fungsi dan perannya (*socially sensitive, socially responsible, dan socially intelegence*), memiliki sikap disiplin pribadi, mampu berfikir kritis kreatif dan inovatif, agar dicapai kualitas pribadi dan perilaku warga negara dan warga masyarakat yang baik (*socio civic behavior and desirable personal qualities*).⁸

Tiga pertanyaan di atas, mengundang minat penulis untuk melakukan telaah kritis materi pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan. Kemudian memilih buku *Kewarganegaraan untuk SMA Kelas X*, karya Budiyanto, penerbit Erlangga, tahun 2004 untuk dikritisi.

Ada 3 alasan penulis memilih buku Pendidikan Kewarganegaraan di atas, yaitu: (1) Disusun berdasarkan Kurikulum 2004 (Berbasis Kompetensi), alias kurikulum terakhir sebelum diberlakukan Kurikulum 2013. (2) Berisi tentang aspek "Sistem Berbangsa dan Bernegara", dengan beberapa sub aspek, di antaranya tentang Nilai dan Norma (agama, kesucilaan, kesopanan dan hukum), yang sangat erat terkait dengan permasalahan akhlak atau moral. (3) Sejak tahun 2004, dimana buku Kewarganegaraan karya Budiyanto diterbitkan, justru terjadi peningkatan kasus-kasus pelanggaran akhlak peserta didik, terutama tawuran yang banyak memakan korban. Sebagaimana diungkap Komisi Nasional Perlindungan Anak, bahwa sejak tahun 2011 korban akibat tawuran pelajar mencapai 339 kasus, dengan korban tewas mencapai 82 korban. Jumlah itu meningkat tajam dari tahun 2010 sebanyak 128 kasus.⁹

Selain buku Kewarganegaraan karya Budiyanto di atas, penulis juga menelaah 3 buah buku lainnya, yaitu; (1) *Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMA/MA/SMK Kelas X*, penyusun Aang Witarsa Rofik, penerbit CV Regina, tahun 2007. (2) *Kewarganegaraan (Citizenship) SMA Kelas 1*, penyusun Wijianto, penerbit Piranti, tahun 2004. (3) *Praktik Belajar Kewarganegaraan untuk SMA Kelas X*, penyusun Sujiyanto dan Muhlisin, penerbit Ganeca Exact, tahun 2007.

II. Metodologi

Sesuai dengan objek yang diteliti yaitu materi pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, maka penelitian ini menggunakan *metode deskriptif*, yaitu “metode yang digunakan untuk melacak dan mendeskripsikan segala hal yang berkaitan dengan pokok permasalahan serta menyimpulkannya”.¹⁰ *Metode deskriptif* memiliki tujuan menggambarkan sifat suatu keadaan yang sementara berjalan pada saat penulisan dilakukan, dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu.¹¹

Sumber data yang digali ada 2, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer adalah teks resmi sumber data, yaitu buku *Kewarganegaraan untuk SMA Kelas X*, penyusun Budiyanto, penerbit Erlangga, tahun 2004. Ditambah buku-buku Pendidikan Kewarganegaraan untuk kelas XI dan XII. Adapun data sekunder adalah buku-buku, majalah-majalah, berita-berita harian, dan tulisan-tulisan yang memenuhi kriteria sebagai referensi. Juga e-book, dan website-website yang mempunyai referensi jelas.

Analisis data dilakukan dengan menyusun bagian-bagian dari materi pembelajaran buku Pendidikan Kewarganegaraan untuk SMA Kelas X, juga kelas XI dan XII yang kering dari nilai-nilai Islam.

III. Hasil Dan Pembahasan

Sidi Gazalba dalam bukunya “*Islam & Perubahan Sosiobudaya*” menyatakan, bahwa tiap masyarakat dalam perjalanan hidupnya selalu mengalami perubahan. Perubahan itu ada yang kentara sekali, ada yang tidak begitu menarik perhatian, ada yang berpengaruh secara luas, ada yang terbatas, ada yang bersifat evolusi, dan ada yang revolusi.¹²

Sidi Gazalba juga menyatakan 4 sebab terjadinya perubahan masyarakat, yaitu; (1) bertambah majunya ilmu pengetahuan dan teknologi, (2) karena faktor komunikasi dan transportasi, (3) urbanisasi, dan (4) bertambahnya harapan dan tuntutan manusia. Khusus terkait dengan perubahan masyarakat Muslim, Sidi Gazalba menyatakan, bahwa selain faktor-faktor di atas, juga karena faktor perubahan aqidah, dibukanya ijtihad, dan pertimbangan dunia akhirat.¹³

Menurut Abuddin Nata, bahwa nilai-nilai agama merupakan bagian yang dapat mempengaruhi kondisi pendidikan. Berbagai perubahan dan perkembangan yang terjadi pada seluruh aspek kehidupan manusia sangat mempengaruhi kondisi pendidikan.¹⁴ Pernyataan Abuddin Nata tersebut difahami penulis, bahwa nilai-nilai agama yang mewarnai materi pembelajaran akan memberikan pengaruh terhadap berbagai perubahan

dan perkembangan yang terjadi pada seluruh aspek kehidupan manusia, termasuk aspek moral atau akhlak.

Berdasarkan teori perubahan menurut Sidi Gazalba di atas, khususnya yang terkait dengan perubahan masyarakat Muslim, maka materi pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang diperkaya sekaligus diperkuat nilai-nilai agama khususnya ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW, juga pendapat para Cendekiawan Muslim, akan memiliki kekuatan untuk merubah akhlak bangsa Indonesia, karena ada muatan akidah, dibukanya ijtihad, dan ada pertimbangan dunia akherat. Adapun pernyataan Abuddin Nata di atas, difahami penulis bahwa nilai-nilai agama akan memberikan pengaruh terhadap berbagai perubahan dan perkembangan yang terjadi pada seluruh aspek kehidupan manusia.

Teori lainnya dikemukakan Prof. T. Yacob yang dikutip oleh A. Syafii Maarif tentang hubungan ilmu pengetahuan, teknologi, dan etika, yaitu "Jika kita sudah mengetahui ilmu (apa, bagaimana) dan teknologi (dapat dijadikan apa), kita wajib naik ke tahapan etika (bolehkah, baikkah)".¹⁵ Artinya, orang-orang yang telah memahami ilmu pengetahuan dan teknologi, akan menerapkannya dengan tidak mengabaikan nilai-nilai akhlak, terutama yang terkait dengan masalah boleh atau dilarang diterapkan, dan apakah baik atau buruk diterapkan.

Bangsa Indonesia yang mayoritas Muslim, akan memandang materi pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang diperkuat ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW sebagai akidah dan syari'ah yang diyakini kebenarannya sekaligus diwujudkan dalam amal perbuatan. Sebagaimana dikatakan Mahmud Syaltut:

Kedudukan akidah dan syari'ah bagi Umat Islam menempati kedudukan tinggi dalam keyakinan dan pandangan umat Islam. Akidah merupakan pondasi yang di atasnya dibangun syari'ah atau peraturan-peraturan agama.¹⁶

Menurut Sidi Gazalba, bahwa apabila akidah bertambah kuat, maka akan langsung berakibat kepada masyarakat.¹⁷ Artinya, bangsa Indonesia akan berakhlak dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara, karena telah mendapatkan materi pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan yang sesuai dengan akidah dan syari'ah Islam. Pendapat Sidi Gazalba tersebut sejalan dengan pandangan Mahmud Syaltut, yaitu:

Dengan memandang pada aqidah dan syari'ahnya, seluruh manusia berkedudukan sama di dalam Islam. dengan Islam, semua bangsa dan golongan dituntut kebersamaannya tanpa memandang perbedaan pribadi yang ada di antara mereka, misalnya laki-laki atau wanita, hitam atau putih. Atau karena perbedaan sosial, misalnya antara pemimpin dan rakyat, pemerintah dan yang diperintah serta kaya dan miskin.¹⁸

Jika pandangan Mahmud Syaltut di atas menjadi spirit dalam penyusunan materi pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan, maka akan memberikan pengaruh besar terhadap akhlak bangsa Indonesia. Bangsa ini akan berada dalam situasi kehidupan yang dilandasi sikap kebersamaan, kesetaraan, saling menghormati dan saling menghargai di kalangan bangsa Indonesia. Dengan demikian, kasus-kasus pelanggaran norma akhlak seperti korupsi, kolusi, penyalahgunaan obat-obat terlarang, tindak kriminal, dan konflik

horizontal yang berlatar belakang masalah politik, suku, agama, ras, dan antar golongan (sara) dapat diminimalisir, bahkan tidak akan terjadi.

Disamping itu, masalah pendidikan akan berjalan dengan baik, sebab para penanggung jawabnya dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan serius, amanah, dan bertanggung jawab. Demikian pula masalah pengangguran dan kemiskinan, dipastikan dapat ditekan bahkan teratasi, sebab uang rakyat yang dikelola oleh negara benar-benar akan dipergunakan sepenuhnya untuk kepentingan rakyat pula. Kemudian, negara akan membuka lapangan-lapangan pekerjaan untuk menghasilkan produk-produk unggulan yang dapat memenuhi kebutuhan di dalam negeri dan di ekspor ke luar negeri.

Dengan demikian, tujuan pendidikan Nasional, yakni berkembangnya potensi agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab, benar-benar tercapai.

IV. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap materi pembelajaran buku Kewarganegaraan untuk SMA kelas X, penyusun Budiyanto, penerbit Erlangga, tahun 2004, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Isinya kering dari nilai-nilai Islam. Seluruh pokok bahasanya tidak ada yang dikaitkan dengan konsep Islam yang bersumber kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah, juga pendapat para tokoh Muslim atau Cendekiawan Muslim. Padahal tema-tema dalam pokok-pokok bahasanya memerlukan penguatan nilai-nilai Islam. Pokok-pokok bahasan dimaksud yaitu; (1) tentang Hakikat Bangsa dan Negara, (2) tentang Nilai dan Norma, (3) tentang Penegakan Hak Asasi Manusia (HAM) dan Implikasinya, (4) tentang Masyarakat Politik, (5) Prinsip-prinsip Demokrasi, dan (6) tentang Hubungan Dasar Negara dan Konstitusi. Seluruh isi pokok-pokok bahasan tersebut mengacu kepada pendapat-pendapat para tokoh Barat, dan tidak ada yang menyentuh nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, buku Pendidikan Kewarganegaraan untuk Sekolah Menengah Atas kelas X sangat sekuler, sebab kering dari nilai-nilai ajaran Islam.
2. Konsep pengembangan materi pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dalam perspektif Islamisasi ilmu dan sebagai pembinaan akhlak mulia, adalah dengan menambahkan pokok bahasan dan atau sub pokok bahasan tentang konsep Islam terutama ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits Nabi SAW, juga pandangan-pandangan para tokoh Muslim atau para Cendekiawan Muslim. Dengan demikian, muncul pokok bahasan atau sub pokok bahasan tentang; (1) Konsep Islam tentang manusia, (2) Konsep Islam tentang bangsa, (3) Konsep Islam tentang negara, (4) Konsep Islam tentang nilai, (5) Konsep Islam tentang norma, (6) Konsep Islam tentang hukum, (7) Konsep Islam tentang hak asasi manusia (HAM), (8) Konsep Islam tentang politik, (9) Konsep Islam tentang demokrasi, (10) Konsep Islam tentang konstitusi.

REFERENCES

- [1] Hamka Abdul Aziz, *Pendidikan Karakter Berpusat pada Hati, Akhlak Mulia Membangun Karakter Bangsa*, Jakarta, Al-Mawardi Prima, 2011, hlm 76.
 - [2] Ibid, hlm. 78.
 - [3] Ramayulis, *Ilmu Pendidikan Islam*, Cet. IX, Jakarta, Kalam Mulia, 2011, hlm. 38
 - [4] Muhammad Athiyah Al-Abrasyi, "*Dasar-dasar Pokok Pendidikan Islam* (terjemahan), Cet. VII, Jakarta, Bulan Bintang, 1993, hlm. 10
 - [5] Muhammad Khalid Fathoni, *Pendidikan Islam dan Pendidikan Nasional (Paradigma Baru)*, Jakarta, Dirjen Kelembagaan Agama Islam, 2005, hlm. 5.
 - [6] Pimpinan MPR dan Tim Kerja Sosialisasi MPR Periode 2009 – 2014, *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*, Cet. II, Jakarta, Sekretariat Jenderal MPR RI, 2012, hlm. 102 – 103.
 - [7] Zaenal Abididn Ahmad, *Konsepsi Negara Bermoral*, Cet. I. Jakarta, Bulan Bintang, 1975, hlm. 251.
 - [8] Abdul Aziz Wahab dan Sapriya, *Teori dan Landasan Pendidikan Kewarganegaraan*, Bandung, Alfabeta, 2011 , hlm. 311.
 - [9] Budiyanto, *Kewarganegaraan untuk SMA Kelas X*, Jakarta, Erlangga, 2004, hlm. 2.
 - [10] Hadi Sutrisna, *Metodologi Research. I*, Yogyakarta, Fak. Psikologi UGM, 198, hlm, 3
 - [11] G. Sevilla, Consuelo, *An Introduction to Research Methods*. Diterjemahkan oleh Alimuddin Tuwu, *Pengantar Metode Penulisan*, UI Press, Jakarta, 2006, hlm. 71.
 - [12] Sidi Gazalba, *Islam & Perubahan Sosiobudaya*, Jakarta, Pustaka Alhusna, 1983, hlm. 15.
 - [13] Ibid, hlm. 18.
 - [14] Abuddin Nata, *Perspektif Islam tentang Strategi Pembelajaran*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2009, hlm. 14 dan 15.
 - [15] A. Syafii Maarif, *Mencari Autentisitas dalam Kegagalan*, Pusat Study Agama dan Peradaban (PSAP) Muhammadiyah, 2004, hlm. 12.
 - [16] Mahmud Syaltut, *Islam, Akidah dan Syari'ah* Cet. II. (terjemahan), Jakarta, Pustaka Amani, 1998, hlm. 7.
 - [17] Sidi Gazalba, *Islam & Perubahan Sosiobudaya*, Jakarta, Pustaka Alhusna, 1983, hlm. 19.
 - [18] Mahmud Syaltut, *Islam, Akidah dan Syari'ah* Cet. II. (terjemahan), Jakarta, Pustaka Amani, 1998, hlm. 8.
-